

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah semua seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.

Menurut Lili M. Sadeli (2006:2) adalah :

“Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut”

2.1.1.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut Abdul Hafiz (2006:35) adalah :

“Dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Marwansyah (2014:3) adalah :

“Pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja dan hubungan industrial.”

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.3.1 Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah karakteristik dasar atau kemampuan sumber daya manusia dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan SDM.

Kompetensi menurut Wibowo (2010:324) :

“Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”

Sedanglam menurut Marwansyah (2014:36) :

“Kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakteristik pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati dan dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan”

Lyle Spencer & Signe Spencer dalam Moehoriono (2010:3) mengatakan kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (*A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation*). Berdasarkan dari definisi tersebut, maka beberapa makna yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut :

- Karakteristik dasar (*underlying characteristic*) kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.
- Hubungan kausal (*causally related*) berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja tinggi pula (sebagai akibat).
- Kriteria (*criterion referenced*) yang dijadikan sebagai acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan spesifik atau terstandar.

Kemudian menurut Janis Judrups (2015) mengatakan :

“Competences are a popular technique for the evaluation of human resources in various organisations. They permit assessing and developing the abilities of employees that are most important for an organisation, permit separating the best employees from the worst, finding and

attracting employees suitable for the organisation, and linking the abilities of employees to strategic goals of an organisation.”.

Sementara menurut George Chryssolouris (2013) mengatakan :

“Competence is one's capability to (according to certain formal or informal criteria) handle certain situations successfully or complete a job”.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling terkait mempengaruhi sebagian besar jabatan (peranan atau tanggung jawab), berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut, dan dapat diukur dengan standar-standar yang dapat diterima, serta dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan.

Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan peran pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja. Untuk menunjukkan kompetensi sesuai peranannya, seorang akuntan profesional harus memiliki (a) pengetahuan profesional yang diperlukan, (b) keterampilan profesional, dan (c) nilai, etika, dan sikap profesional.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif.

Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Ketidaksesuaian dalam kompetensi-

kompetensi inilah yang membedakan seorang pelaku unggul dari pelaku yang berprestasi terbatas. Kompetensi terbatas dan kompetensi istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu merupakan pola atau pedoman dalam pemilihan karyawan (*personal selection*), perencanaan pengalihan tugas (*succession planning*), penilaian kerja (*performance appraisal*) dan pengembangan (*development*).

2.1.3.2 Komponen Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Spencer & Spencer dalam Moehariono (2010:13) terdapat 5 (lima) komponen kompetensi, adalah sebagai berikut:

1. Sikap (*traits*), yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu, misalnya percaya diri (*self-confidence*), kontrol diri (*self-control*), ketabahan atau daya tahan (*hardiness*).
2. Motif (*motive*), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan.
3. Bawaan (*self-concept*), yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
4. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu dan pada area tertentu.
5. Keterampilan atau keahlian (*skill*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental.

Spencer dalam Moehariono (2010: 15) mengemukakan bahwa konsep diri (*self-concept*), watak (*trait*), dan motif (*motive*) cenderung tidak tampak atau tersembunyi. Kompetensi ini dapat menyesuaikan atau diaplikasikan dalam berbagai situasi atau *starting qualifications*, yang isinya adalah keterampilan sosial dan komunikasi, teknik umum dan situasi berubah-ubah, kualitas organisasional serta pendekatan dasar pekerjaan dan situasi.

Sehingga pada akhirnya Spencer mengemukakan bahwa apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di organisasi, karyawan yang kompeten adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan syarat pekerjaan sehingga dapat berpartisipasi aktif di tempat kerja.

Komponen dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku menurut *International Federation of Accountants* (2014) dalam *IAESB: Handbook of International Education Pronouncements* menyatakan bahwa:

“The content of professional accounting education should consist of:

- 1. accounting, finance and related knowledge;*
- 2. organizational and business knowledge; and*
- 3. Information technology knowledge and competences. (p.37)*

The skills professional accountants require are grouped under five main headings:

- 1. intellectual skills;*
- 2. technical and functional skills;*
- 3. personal skills;*
- 4. interpersonal and communication skills; and*
- 5. organizational and business management skills. (p.45)*

The coverage of values and attitudes in education programs for professional accountants should lead to a commitment to:

- 1. the public interest and sensitivity to social responsibilities;*
- 2. continual improvement and lifelong learning;*
- 3. reliability, responsibility, timeliness, courtesy and respect; and*
- 4. laws and regulations”. (p.52)*

Kompetensi dapat dihubungkan dengan kinerja dalam sebuah model alir sebab-akibat yang menunjukkan bahwa tujuan, perangai, konsep diri, dan kompetensi pengetahuan yang kemudian memprakirakan kinerja kompetensi mencakup niat, tindakan dan hasil akhir. Misalnya, motivasi untuk berprestasi, keinginan kuat untuk berbuat lebih baik dari pada ukuran baku yang berlaku dan untuk mencapai hasil yang maksimal, menunjukkan kemungkinan adanya perilaku kewiraswastaan, penentuan tujuan, bertanggung jawab atas hasil akhir

dan pengambilan resiko yang diperhitungkan.

Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi dan pengertian kompetensi ini dapat kita padukan dengan keterampilan dasar (*soft skill*), keterampilan baku (*hard skill*), keterampilan sosial (*social skill*), dan keterampilan mental (*mental skill*). Keterampilan baku (*hard skill*) mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM; keterampilan dasar (*soft skill*) menunjukkan intuisi dan kepekaan SDM; keterampilan sosial (*social skill*) menunjukkan keterampilan dalam hubungan sosial SDM; keterampilan mental (*mental skill*) menunjukkan ketahanan mental SDM.

2.1.3.3 Tipe Kompetensi Sumber Daya Manusia

Tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku manusia dan dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut, dan beberapa tipe kompetensi tersebut menurut Wibowo (2010:328) adalah sebagai berikut:

1. *Planning Competency*, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.
2. *Influence Competency*, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasional.
3. *Communication Competency*, dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.
4. *Interpersonal Competency*, meliputi empati, pembangunan konsensus, *networking*, persuasi, negoisasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi *team player*.
5. *Thinking Competency*, berkenaan dengan berpikir strategis, berpikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.

6. *Organizational Competency*, meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan dilakukan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.

7. *Human Resources Management Competency*, merupakan kemampuan dalam bidang *team building*, mendorong partisipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman.

2.1.3.4 Faktor-Faktor Pembentuk Kompetensi Sumber Daya Manusia

Semua organisasi tentu menginginkan sumber daya manusia mereka memiliki kompetensi yang unggul dan handal, sehingga mampu mendongkrak kinerja organisasi. Untuk itu diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap faktor-faktor determinan bagi kompetensi. Menurut Zwell dalam Sudarmanto (2009:54) terdapat tujuh determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yakni:

1. Keyakinan dan Nilai-nilai

Keyakinan terhadap diri maupun terhadap orang lain akan sangat memengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu.

2. Keterampilan

Keterampilan memainkan peranan di berbagai kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik.

3. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan tersebut.

4. Karakteristik Kepribadian

Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang di antaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat berubah. Kenyataannya, kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang merespon dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitarnya.

5. Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seseorang bawahan.

6. Isu Emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Perasaan tentang kewenangan dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan menyelesaikan konflik dengan manajer. Orang mungkin mengalami kesulitan mendengarkan orang lain apabila mereka tidak merasa didengar.

7. Kemampuan Intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Tidak mungkin memperbaiki melalui setiap intervensi yang diwujudkan suatu organisasi. Sudah tentu faktor seperti pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi ini.

8. Budaya Organisasi

Budaya organisasi memengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan mempertimbangkan siapa diantara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat keahliannya tentang kompetensi.
- b. Semua penghargaan mengomunikasikan pada pekerja bagaimana organisasi menghargai kompetensi.
- c. Praktik pengambilan keputusan memengaruhi kompetensi dalam memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.
- d. Filosofi organisasi-misi, visi dan nia-nilai berhubungan dengan semua kompetensi.
- e. Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang berapa banyak kompetensi yang diharapkan.
- f. Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengomunikasikan pada pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang pembangunan berkelanjutan.
- g. Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara langsung memengaruhi kompetensi kepemimpinan.

Dari faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kompetensi tersebut, ada faktor determinan yang dapat dengan mudah diubah dan ada faktor determinan yang sulit diubah. Tabel berikut ini merupakan kompetensi yang dilihat dari tingkat perubahan atau perbaikan. Ada kompetensi yang mudah

diperbaiki, kompetensi agak sulit diperbaiki, dan kompetensi yang sukar diperbaiki

Tabel 2.1
Tingkat Perbaikan Kompetensi

Tingkat Perbaikan	Kompetensi
Mudah diperbaiki	Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja sama tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja, dll.
Agak sulit diperbaiki	Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran strategis, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional, dll.
Sulit diperbaiki	Inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptual, fleksibilitas, dll.

2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi

Suatu organisasi sangat tergantung pada informasi sebagai dasar untuk melaksanakan aktivitasnya, informasi dihasilkan oleh sistem informasi yang merupakan alat untuk memprosesnya. Sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, begitu pula dengan organisasi, akan senantiasa memerlukan informasi terutama sistem informasi akuntansi. Karena hampir semua bidang kegiatan dalam organisasi tidak terlepas dari dukungan informasi yang menunjang kelancaran setiap program yang telah ditetapkan dalam organisasi.

Menurut Azhar susanto (2013:72), mendefinisikan bahwa :

“Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis

untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.”

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2009:28) sistem informasi akuntansi adalah:

“An accounting information system is a system that collect, records, stores and processes data to produce information for decision makers.”

Pernyataan yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data sehingga menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan.

Pada prinsipnya SIA mempunyai peranan penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. SIA memberikan bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Kesimpulannya bahwa sistem informasi yang baik harus memiliki prinsip-prinsip kesesuaian desain sistem dengan tujuan sistem informasi dan organisasi. Sistem Informasi Akuntansi dirancang dan dilaksanakan pada dasarnya untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan atau organisasi. Dari hasil sistem informasi akuntansi ini akan diperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan.

2.1.4.1 Pengertian Sistem

Menurut Azhar Susanto (2013:22) dalam bukunya bahwa pengertian Sistem adalah :

“Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun

baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan.”

Menurut Jogiyanto (2008:1-2), definisi sistem dapat dilihat dari dua kelompok pendekatan yaitu yang menekankan pada prosedur dan yang menekankan pada komponen atau elemennya.

- 1) Berdasarkan Penekan Prosedur
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu
- 2) Berdasarkan Penekanan Komponen
Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Hall (2009) dalam Mardi (2014:3) menyatakan bahwa:

“Sistem adalah sekelompok, dua atau lebih komponen yang saling berkaitan yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama.”

Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Sistem dibangun agar tujuan tercapai tidak meyimpang sehingga resiko kegagalan bisa diminimalkan. supaya target tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya agar sistem dapat dibangun dan menuntun dengan jelas dan tegas setiap aktivitas menuju tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Hall (2009) ada tiga macam tujuan umum sistem yaitu :

- 1) Untuk melindungi fungsi kepengurusan manajemen,
- 2) Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan
- 3) Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan.

Sedangkan menurut M.J Alexander (2001) dalam Mardi (2014:3)

mendefinisikan sistem sebagai berikut:

“Suatu sistem adalah suatu grup dari beberapa elemen, baik berbentuk fisik maupun bukan fisik, yang menunjukkan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan berinteraksi bersama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sistem.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.4.2 Pengertian Informasi

Menurut Azhar Susanto (2013:64), Informasi adalah :

“Hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat.”

Sedangkan menurut Jogiyanto (2008:36) dalam bukunya bahwa :

“Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya.”

dan Menurut UU nomor 14 tahun 2008, Informasi adalah :

“Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.”

Sedangkan menurut Mc Leod dalam Azhar Susanto (2013 : 38) bahwa

suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri :

- a) Akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian akurasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda, apabila pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka data tersebut dianggap akurat.
- b) Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau ada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
- c) Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang

dibutuhkan oleh individu yang ada diberbagai tingkatan dan bagian dalam organisasi.

d) Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap. misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data fakturnya.

2.1.4.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Azhar Susanto (2013:52), Sistem Informasi adalah :

“Kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna.”

Sedangkan menurut Laudon dalam Azhar Susanto (2013:52), Sistem Informasi bahwa :

“Komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran aktivitas didalam perusahaan.”

dan menurut McKeown dalam Azhar Susanto (2013:52) adalah :

“Gabungan dari komputer dan user yang mengelola perubahan data menjadi informasi serta menyimpan data dan informasi tersebut.”

Menurut Azhar Susanto (2013) “Akuntansi adalah bahasa bisnis, setiap organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis”.

Terdapat beberapa definisi sistem informasi akuntansi menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

Sistem Informasi Akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:72) adalah sebagai berikut :

“Sistem Informasi Akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis

untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.”

Menurut Bodnar dan Hopwood (2010:1) sistem informasi akuntansi adalah:

"An accounting information system is a collection of resources, such as people and equipment, designed to transform financial and other data into information".

Pernyataan Bodnar dan Hopwood menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi.

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2009:28) sistem informasi akuntansi adalah :

"An accounting information system is a system that collects, records, stores and processes data to produce information for decision makers".

Pernyataan yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data sehingga menghasilkan informasi untuk pengambil keputusan.

Adapun menurut Wilkinson (2010:7), bahwa sistem informasi akuntansi adalah :

" Unfined structure within an entity such as business firm that employs physical resources and the components to transform economic data into accounting information with purpose of satisfying the information needs of variety of users".

Definisi yang dijelaskan oleh Wilkinson menjelaskan bahwa sistem

informasi akuntansi adalah bersatunya sebuah struktur dalam entitas seperti bisnis perusahaan yang memperkerjakan sumber daya dan komponen lainnya untuk merubah data ekonomi ke informasi akuntansi dengan tujuan memuaskan kebutuhan para pengguna.

2.1.4.4 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi yang baik dalam pelaksanaannya diharapkan akan memberikan atau menghasilkan informasi-informasi yang berkualitas serta bermanfaat bagi pihak manajemen khususnya, serta pemakai-pemakai informasi lainnya dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi yang baik dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya, yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan dan dipercaya. Selain itu suatu sistem informasi akuntansi terdapat unsur fungsi pengendalian sehingga mengurangi terjadinya ketidakrelevanan atau ketidakpastian penyajian informasi. Oleh karena itu, baik buruknya suatu sistem informasi dapat mempengaruhi fungsi manajemen dalam melakukan pengendalian internal karena informasi yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan.

Fungsi sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:8) adalah:

1. Mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan
2. Mendukung proses pengambilan keputusan
3. Membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan.

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2009:29) fungsi sistem informasi akuntansi adalah :

1. *Collect and store data about organizational activities, resources and personal.*
2. *Transform data into information that is useful for making decisions so management can plan, execute, control and evaluate activities, resources and personal.*
3. *Provide adequate controls to safeguard the organization's assets, including its data, to ensure that the assets and data are available when needed and the data are accurate and reliable".*

Pernyataan Romney dan Steinbart menyatakan bahwa fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut.
2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan andal.

2.1.4.5 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Azhar Susanto (2013:207) komponen dalam sebuah informasi akuntansi yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang bekerja secara harmonis dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat diandalkan oleh para pemakai. Dalam konsep sistem informasi akuntansi yang harus diintegrasikan adalah semua unsur dan subunsur yang terkait dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi yang berkualitas. Unsur-unsur tersebut juga disebut sebagai komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari *hardware*, *software*, *brainware*, *prosedur*, *database* dan jaringan komunikasi.

Adapun komponen sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:207) adalah:

1. Perangkat keras (*Hardware*)
Hardware merupakan perangkat fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.
2. Perangkat lunak (*Software*)
Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis.
3. Manusia (*Brainware*)
Brainware atau sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai Sistem Informasi Akuntansi, komponen SDM ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan komponen lainnya di dalam suatu sistem informasi sebagai hasil dari perencanaan, analisis, perancangan, dan strategi implementasi yang didasarkan kepada komunikasi diantara sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu organisasi.
4. Prosedur (*Procedure*)
Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu yang dapat dilakukan secara seragam. Jika prosedur telah diterima oleh pemakai sistem informasi maka prosedur akan menjadi pedoman bagaimana fungsi sistem informasi tersebut harus dioperasikan.
5. Basis data (*Data Base*)
Data base merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan (arti luas) atau di dalam komputer (arti sempit).
6. Jaringan komunikasi (*Communication Network*)
Telekomunikasi atau komunikasi data dapat didefinisikan sebagai penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari suatu lokasi ke suatu lokasi lain berbeda. Komunikasi yang terjadi di antara beberapa pihak yang berkomunikasi harus difasilitasi dengan infrastruktur berupa jaringan telekomunikasi yang konfigurasiannya bisa berbentuk bintang (*star*), cincin (*ring*), dan hirarki (BUS).

Menurut Azhar Susanto (2013:207) adapun penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) *Hardware* (perangkat keras)

Hardware yang digunakan untuk sistem informasi akuntansi harus sesuai atau harmonis dengan kebutuhan sistem informasi akuntansi yang diterapkan dan

kemampuan keuangan perusahaan. Kualitas komponen *hardware* yang digunakan harus asli (*original*) yang dapat diintegrasikan dengan *software* yang akan digunakan. Spesifikasi *hardware* yang dipilih untuk sistem informasi akuntansi yang diterapkan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan, situasi, kondisi dan kebutuhan manajemen perusahaan, serta sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan tersebut yang akan menjalankan sistem informasi akuntansi tersebut. *Hardware* terdiri dari:

a. Bagian input (*input device*)

merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukan data ke dalam komputer. Jenis perangkat masukan komputer adalah *keyboard*, *mouse*, *joystick*, *scanner*, kamera, *touch screen*.

b. Bagian pengolah utama dan memori.

Terdiri dari prosesor, memori, BUS, *cache memory*, *motherboard*, *driver card*.

c. Bagian Output (*output device*)

merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Peralatan output yang biasa digunakan yaitu printer, layar monitor, *Head Mount Display (HMD)*, LCD (*Liquid Cristal Display Projector*) dan speaker.

d. Bagian komunikasi

adalah peralatan yang digunakan untuk mengkomunikasikan data dari satu lokasi ke lokasi.

2) Perangkat Lunak (*Software*)

Dalam memilih *software* apa yang akan dipakai akan lebih baik memilih

dulu sistem operasi apa yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang akan dioperasikan. *Software* yang berkualitas adalah *software* yang berbasis jaringan yang banyak digunakan oleh orang dan perusahaan pada umumnya.

Software dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya yaitu:

- a. Perangkat lunak sistem (*system software*) merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi sistem operasi, *interpreter* dan *complier*.
 - Sistem Operasi (*Operating System*) berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam komputer. Misalnya antara keyboard dengan CPU Layar monitor, dan lain-lain. Contohnya : *Miscrosoft Windows*, *Linus*, dll.
 - *Interpreter* dan *complier*
 - 1) *Interpreter* merupakan *software* yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti manusia ke dalam bahasa komputer atau bahasa mesin perintah per perintah. Contoh *Miscrosoft access*, *Oracle*, *Pascal*, dll.
 - 2) *Complier* (komputer) untuk menterjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer secara langsung satu file.
- b. Perangkat lunak aplikasi (*application software*) merupakan *software* jadi yang siap digunakan. *Software* ini dibuat oleh perusahaan perangkat lunak (*Software house*) baik dalam maupun luar negeri. *Quicken* merupakan salah satu contoh *software* sistem informasi akuntansi yang sangat baik.

3) *Brainware* (manusia)

Orang yang memiliki, membangun dan menjalankan sistem informasi akuntansi. Istilah orang disini bukan sembarang orang dalam arti wujudnya orang akan tetapi orang yang memiliki kompetensi (ilmu pengetahuan dan keterampilan atau keahlian). Misalnya, *Programer* yaitu membuat atau menyempurnakan program komputer yang digunakan saat ini. Programer harus memiliki kompetensi (ilmu pengetahuan dan keterampilan atau keahlian) dan sesuai dengan jenjangnya mengenai sistem informasi, memiliki pendidikan minimal D3 ilmu komputer dan informasi, atau berpengalaman di bidang komputer akuntansi. *Brainware* dikelompokan sebagai berikut:

- a. Manajer sistem informasi (manajemen/akuntansi)
- b. Analis sistem
- c. Ahli komunikasi
- d. Administrator *database*
- e. Programer
- f. Operator
- g. Pustakawan

Integrasi komponen *brainware* mengandung arti semua kelompok *brainware* tersebut harus dapat bekerja sama secara harmonis dalam mendukung beroperasinya sistem informasi akuntansi.

4) Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara konsisten sesuai dengan pedoman yang harus diikuti dan

dibentuk atas dasar kesepakatan dengan penetapan dan pengesahan dilakukan oleh manajemen yang berwenang. Dengan adanya prosedur yang memadai maka dapat dilakukan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan. Antara prosedur satu dengan prosedur lainnya harus terjalin kerjasama yang harmonis atau bersinergi.

5) *Database* dan Sistem Manajemen Database

Merupakan kumpulan data-data akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap sesuai dengan kebutuhan pemakai, yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam perusahaan. *Database* yang dibangun harus dihitung perkiraan volumenya untuk dapat menentukan kapasitas *hardisk* yang dibutuhkan dan tipe prosesor yang cocok untuk menangani data sejumlah yang diperkirakan. Menentukan kebutuhan data dalam database bagi pemakai dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu informasi yang diperlukan. Berdasarkan kebutuhan informasi tersebut maka harus diketahui bagaimana proses untuk menghasilkan informasi tersebut. Database yang digunakan harus sesuai atau ditunjang oleh prosedur yang cocok.

a. Media dan sistem penyimpanan data

Media dan sistem penyimpanan data terdiri dari data

- 1) Media penyimpanan data berurutan - melalui media ini record-record data akan dibaca dengan cara yang sama dengan saat penyimpanan. Sebagai contoh adalah pita magnetik (*magnetic tape*).
- 2) Media penyimpanan secara langsung - memungkinkan pemakai (*user*)

membaca data dalam urutan yang dibutuhkan tanpa perlu memperhatikan urutan penyusunan secara fisik dari media penyimpanan data tersebut.

b. Sistem Pengolahan

Ada dua cara pengolahan data yaitu :

- 1) Pengolahan secara *Batch* (mengumpulkan terlebih dahulu)
- 2) Pengolahan secara *On-line*

c. Organisasi *Database*

- 1) Organisasi data pada database tradisional

memiliki tujuan agar sistem informasi secara efektif memberikan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap. Tapi ada beberapa kelemahan dalam sistem ini seperti :

- a) Data rangkap dan tidak konsisten
- b) Kesulitan mengakses data
- c) Data tersolasi
- d) Data sulit diakses secara bersamaan
- e) Masalah keamanan data
- f) Masalah integritas

- 2) Organisasi database modern

Memberikan banyak keuntungan bagi implementasi Sistem Informasi Akuntansi.

d. Model-model data secara umum model data terbagi dalam beberapa model, yaitu :

- 1) Model hirarki - model data yang menggambarkan hubungan antara data berdasarkan tingkatannya.
 - 2) Model *network* - model data yang menggambarkan hubungan antara data berdasarkan kepentingannya.
 - 3) Model relasi - model data yang menggambarkan hubungan antara dua entitas/organisasi.
- 6) Jaringan komputer dan telekomunikasi

Komponen-komponen yang digunakan dalam jaringan komunikasi data satu sama lain harus berintegrasi secara harmonis atau bersinergi membentuk jaringan komunikasi data dalam sistem informasi akuntansi. Komponen jaringan komunikasi data yang harus bersinergi misalnya antara sub yang digunakan, saluran komunikasi dan *Network Card (LAN Card)*. Keharmonisan teknologi yang digunakan dalam jaringan komunikasi (*Network*) harus sesuai dengan *hardware* yang digunakan.

Komponen-komponen dan fungsi dari sistem telekomunikasi yaitu:

- a. Komponen sistem telekomunikasi
- b. Fungsi sistem telekomunikasi
- c. *Protocol*
- d. Jenis-jenis sinyal
- e. Jenis-jenis saluran komunikasi
- f. Karakteristik saluran komunikasi
- g. Pemroses komunikasi
- h. *Software* telekomunikasi

2.1.4.6 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi adalah sama dengan tujuan penyusunan sistem akuntansi antara lain :

- 1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru.
- 2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasi.
- 3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
- 4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Tujuan di atas dapat dijelaskan bahwa biasanya perusahaan atau organisasi baru memulai usahanya sangat memerlukan penyusunan sistem informasi akuntansi yang lengkap. Namun, adakalanya sistem informasi akuntansi yang sudah ada tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu ketepatan penyajian, maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengendalian intern, maka pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik.

2.1.5 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

2.1.5.1 Definisi Penerapan

Kata “penerapan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah

menerapkan, melaksanakan, sesuatu yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut bila dikaitkan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan pelaksanaan kandungan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 sebagai pedoman bagi pemerintah mulai dari penerapan akrual basis, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan akrual basis.

2.1.5.2 Strategi Penerapan SAP Akrual

Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan penerapan SAP tersebut. Oleh karena itu, KSAP mencoba untuk menyusun rencana strategi penerapan SAP berbasis akrual. Strategi penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Strategi Penerapan SAP Akrual

Tahun	Agenda
2010	<input type="checkbox"/> Penerbitan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual <input type="checkbox"/> Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual

Tahun	Agenda
	<ul style="list-style-type: none"> □ Sosialisasi SAP berbasis akrual
2011	<ul style="list-style-type: none"> □ Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi □ Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requirement</i>) □ Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2012	<ul style="list-style-type: none"> □ Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan) □ Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	<ul style="list-style-type: none"> □ Piloting beberapa KL dan BUN □ Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem □ Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	<ul style="list-style-type: none"> □ <i>Parallel run</i> dan konsolidasi seluruh LK □ Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem □ Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	<ul style="list-style-type: none"> □ Implementasi penuh □ Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) <p>Sumber: KSAP</p>

Sumber: KSAP (2011)

2.1.5.3 Definisi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

2.1.5.3.1 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah menurut Anggun Jayanti (2012) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (137:2010) yaitu :

“Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah :

“Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal yang efektif.”

Sementara berdasarkan Permendagri No 64 Tahun 2013 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah :

“Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah suatu prinsip akuntansi yang dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

SAP disusun oleh Peraturan Pemerintahan No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menuai 12 (dua belas) pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah (Binsar Sihombing, 13:2011).

Berikut poin-poin dalam PP No 71 Tahun 2010 yang bisa dijadikan pedoman dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI oleh pemerintah daerah :

1) PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

a. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus kas. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

b. Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

c. Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya dalam setahun.

2) PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat maupun daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

a. Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus atau Defisit, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan neto dan Sisa lebih atau

kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

3) PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Penyajian laporan arus kas terdiri dari :

a. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

b. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

c. Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan deficit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim 1 pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

d. Aktivitas Nonanggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan kiriman uang.

4) PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CALK biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan.
- c. Kebijakan akuntansi.
- d. Penjelasan pos-pos laporan keuangan.
- e. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang digunakan.
- f. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

5) PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

a. Pengakuan persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau

kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil investarisasi fisik.

b. Pengukuran persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

6) PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

a. Klasifikasi Investasi

- Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik diantaranya adalah dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas, berisiko rendah.

- Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

b. Pengukuran Investasi

Suatu pengukuran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atau suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliably*).

c. Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode :

- a) Metode Biaya : Investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
- b) Metode Ekuitas : Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
- c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

7) PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Masalah utama akuntansi aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atau penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

a. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

b. Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan

memenuhi kriteria diantaranya yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh dan dibangun dengan maksud untuk digunakan.

c. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

8) PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut dikerjakan.

a. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

b. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain, biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang didapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

9) PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

a. Klasifikasi Kewajiban

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

b. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal stsd kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

10) PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

a. Koreksi Kesalahan

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan. Dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atas standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

c. Perubahan Estimasi Akuntansi

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional tahun perubahan dan tahun-tahun

selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan tersebut akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

d. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan bebas tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak social atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

11) PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbale balik (*reciprocal account*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

12) PSAP No. 12 Laporan Operasional

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut :

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan 9 catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah suatu prinsip akuntansi yang dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, dengan karakteristik (sumber: PP No 71 tahun 2010) :

1. PSAP No. 01 Penyajian laporan keuangan
 - a) Komponen Laporan Keuangan
 - b) Identifikasi Laporan Keuangan
 - c) Periode Pelaporan
2. PSAP No. 02 Laporan realisasi anggaran berbasis kas
 - a) Basis Kas
 - b) Periode Pelaporan
 - c) Isi Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP No. 03 Laporan arus kas
 - a) Aktivitas operasi
 - b) Aktivitas investasi
 - c) Aktivitas pendanaan
 - d) Aktivitas transitoris

4. PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan
 - a) Susunan Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP No. 05 Akuntansi persediaan
 - a) Pengakuan persediaan
 - b) Pengukuran persediaan
6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi
 - a) Klasifikasi investasi
 - b) Pengakuan investasi
 - c) Penilaian investasi
7. PSAP No. 07 Akuntansi aset tetap
 - a) Klasifikasi aset tetap
 - b) Pengakuan aset tetap
 - c) Pengukuran aset tetap
8. PSAP No. 08 Akuntansi konstruksi dalam pembangunan
 - a) Pengakuan dan Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan
9. PSAP No. 09 Akuntansi kewajiban
 - a) Klasifikasi kewajiban
 - b) Pengakuan kewajiban
 - c) Pengukuran kewajiban
10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan
 - a) Koreksi kesalahan
 - b) Perubahan kebijakan akuntansi

- c) Perubahan estimasi akuntansi
 - d) Operasi yang tidak dilanjutkan
11. PSAP No. 11 Laporan keuangan konsolidasi
- a) Penyajian laporan keuangan konsolidasian
12. PSAP No. 12 Laporan operasional
- a) Penyajian Laporan operasional

2.1.5.3.2 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah

Manfaat - manfaat penerapan basis akrual menurut H Thompson dalam Bambang Widjajarso (2008), akan mencakup hal-hal seperti:

- a) Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
- b) Menunjukkan bagaimana aktifitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
- c) Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah.
- d) Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah.
- e) Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.

2.1.5.4 Akuntansi Berbasis Akrual

2.1.5.4.1 Definisi Akuntansi Berbasis Akrual

Ada beberapa definisi akuntansi berbasis akrual, yaitu :

Menurut Nunuy (2007:17) :

“Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada

saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas”.

Sedangkan Abdul halim , (2007:49) menyatakan :

“Akuntansi berbasis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setra kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya”.

Menurut Hoesada (2010:119) :

“Akuntansi berbasis akrual yaitu mengakui pendapatan dan beban dalam suatu periode akuntansi pada saat pendapatan atau beban muncul, tanpa mempedulikan kapan kas dibayar atau diterima tunai, dengan tujuan membandingkan beban yang terjadi pada suatu periode dengan manfaat (*benefit*) diterima tunai dalam periode tersebut. Akuntansi akrual mengakui (1) aset yang diperoleh secara kredit (bukan tunai) pada dua sisi neraca, yaitu aset dan kewajiban, dan (2) penghasilan / pendapatan berbentuk tagihan. Sebagai konsekuensi selanjutnya, akuntansi akrual mencatat peristiwa pembayaran hutang (dengan tunai) dan penerimaan piutang (dengan tunai) sebagai peristiwa akuntansi”.

Menurut International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) :

“Accrual basis means a basis of accounting under which transactions and equivalent is received or paid). Therefore, the transactions and events are recorded in the accounting records and recognized in the financial statements of the periods to which they relate. The elements recognized under accrual accounting are assets, liabilities, net assets/equity, revenue and expenses”.

Basis akrual menurut PSAP 01 adalah:

“Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”.

Teknik akrual basis memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau

keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain akrual basis digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Jadi, akrual basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2.1.5.4.2 Alasan-alasan Penerapan Basis Akrual

1. Basis akrual secara nyata memiliki manfaat yang besar dalam menyajikan informasi atas seluruh aktivitas yang terjadi. Maka dari itu, Widjajerso (2009) memaparkan alasan penerapan basis akrual pada sektor pemerintahan, antara lain: 1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya informasi tentang hutang dan piutang untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
2. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
3. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.
4. Hanya akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.

2.1.5.4.3 Keunggulan dan Kelemahan Akuntansi Berbasis Akrua

Disamping itu, pencatatan akuntansi dengan metode kas basis juga mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara Akrua Basis antara lain :
 - a) Metode akrual basis digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.
 - b) Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih dan terpercaya.
 - c) Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima.
 - d) Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar (sesuai dengan Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan basis akrual).
 - e) Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih.
 - f) Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
 - g) Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.
 - h) Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan kedepannya.
 - i) Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

- 2) Kelemahan Pencatatan Akuntansi Secara Akruwal Basis antara lain :
- a) Metode akruwal basis digunakan untuk pencatatan.
 - b) Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
 - c) Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan.
 - d) Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
 - e) Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.

2.1.5.4.4 Tantangan Akuntansi Berbasis Akruwal

Penerapan akuntansi berbasis akruwal di pemerintahan Indonesia sejatinya sudah harus dilaksanakan sejak tahun 2008 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 pasal 36 ayat 1 menyatakan:

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruwal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13,14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat lambatnya dalam 5 (lima) tahun.”

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 70 ayat 2 dinyatakan:

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruwal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 undang-undang ini dilaksanakan selambat-

lambatnya pada tahun anggaran 2008.”

Namun, pada kenyataannya sampai sekarang penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut belum terealisasi dengan maksimal, walaupun peraturan tentang standar akuntansi akrual telah diterbitkan. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur.

Keberhasilan suatu perubahan akuntansi pemerintahan menuju basis akrual agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, apalagi lagi jika pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual (Simanjuntak, 2010).

Menurut Simanjuntak (2010) beberapa tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Sistem Akuntansi dan Information Technology (IT) Based System*

Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang

No 1 tahun 2004 pasal 58 ayat 1 yang menyatakan:

“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.”

2. Komitmen dari Pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang-undang pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan negara, termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Yang menjadi ujian sekarang adalah peningkatan kualitas produk akuntansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan oleh kementerian/lembaga di pemerintah pusat dan dinas/unit untuk pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu pada pedoman yang disusun oleh menteri keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi para pimpinan kementerian/lembaga di pusat dan

Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.

3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR dan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.

Pada saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa dengan semakin kuatnya upaya untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

4. Resistensi Terhadap Perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti

perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi.

5. Lingkungan/Masyarakat

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.

Sedangkan menurut Blondal (2003), terdapat beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yaitu:

1. Persiapan dalam perubahan budaya entitas pemerintah. Basis akrual tidak hanya sekedar pelatihan teknik akuntansi. Basis ini melibatkan perubahan budaya dalam entitas pemerintah. Basis akrual dikatakan berhasil apabila laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual dapat memperbaiki pengambilan keputusan. Memang perubahan ini tidak terjadi secara otomatis, jadi diperlukan sosialisasi secara aktif khususnya pada pegawai senior dan pegawai yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan.
2. Pemilihan model implementasi. Terdapat dua model dalam upaya implementasi basis akrual yang dijadikan pertimbangan, yaitu Model Big

Bang dan Model Bertahap. Pada pendekatan model Big Bang, basis akrual secara langsung diterapkan pada entitas pemerintah, pengambilan keputusan harus segera dibuat seiring dengan kemuculan berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari penggunaan sistem akuntansi yang baru. Namun, dengan berjalannya waktu sistem akuntansi akrual nantinya akan dapat memberikan solusi terbaik dari permasalahan- permasalahan tersebut. Sementara itu pada pendekatan model Bertahap, dua basis diterapkan secara paralel pada masa transisi. Artinya, entitas pemerintah tidak hanya menerapkan akuntansi basis akrual, tetapi juga tetap mempertahankan basis kas dalam penyusunan laporan keuangan dan anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi resiko kegagalan pada penerapan basis akrual.

3. Membutuhkan komunikasi. Negara yang pertama kali mengimplemantasikan basis akrual dalam akuntansi pemerintahannya membutuhkan lebih banyak komunikasi mengenai proses pengimplementasian. Komunikasi ini mencakup sosialisasi adanya perubahan budaya organisasi. Dalam hal ini hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak- pihak yang bersangkutan.
4. Keahlian akuntansi. Dibutuhkan berbagai pengembangan keahlian dan pelatihan SDM dalam implementasi akrual. Hal ini sangat penting dilaksanakan untuk meningkatkan keahlian mereka yang selama ini masih terlatih hanya sebatas akuntansi basis kas.
5. Pemilihan *IT Based System* (sistem teknologi informasi). Perubahan sistem

akuntansi dalam entitas pemerintah selalu diikuti oleh perubahan teknologi informasi. Pada implementasi basis akrual, sistem teknologi informasi (IT) juga harus diperbarui agar dapat menangani tambahan informasi terkait basis akrual. Penggunaan *software* IT dapat mengadopsi *software* yang digunakan perusahaan komersial atau entitas pemerintah dapat merancang sistem IT sendiri untuk diaplikasikan.

2.1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Terdahulu	Temuan	Posisi Penelitian Saat Ini		Variabel Yang Sama		
		Persamaan	Perbedaan	X1	X2	Y
Kristiyono (2013) faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan keuangan daerah sesuai PP No 71 Tahun 2010	Hal menonjol yang terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah.	Topik penelitian tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual	Obyek penelitian Penelitian hanya dilakukan pada dua variable yang mempengaruh i penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual			X
Ni Made Ari Widyastuti, Edy Sujana, I Made Pradana Adiputra (2015). - Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam	Kompetensi SDM dan SIA berpengaruh terhadap penerapan Akuntansi Berbasis Akrual	Topik penelitian tentang akuntansi berbasis akrual	Obyek penelitian Penelitian hanya dilakukan pada dua variable yang	X	X	X

Nama Peneliti Terdahulu	Temuan	Posisi Penelitian Saat Ini		Variabel Yang Sama		
		Persamaan	Perbedaan	X1	X2	Y
Penelitian Judul						
Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua			mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua			
Tengku Azman (2015)- Analisis Komitmen Organisasi, Kesiapan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur serta Sistem Informasi Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	Komitmen organisasi, kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua. Menunjukkan	Topik penelitian tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua	Obyek penelitian Penelitian hanya dilakukan pada dua variable yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua	X		X
Hetti Herlina (2013) – Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010	bahwa kompetensi SDM dan sistem informasi akuntansi berpengaruh dalam kesiapan penerapan akrua basis.	Topik penelitian tentang penerapan akuntansi akrua basis	Obyek penelitian Penelitian hanya dilakukan pada dua variable yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua	X	X	X

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Alam dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Menurut Binsar H Simanjuntak (2005) menyatakan :

“Untuk keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia perlu diambil berbagai langkah, antara lain memelihara momentum perubahan dan mempersiapkan SDM yang kompeten.”

Sedangkan itu, Binsar H Simanjuntak (2010) juga menyatakan :

“Penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan SDM yang andal di bidang akuntansi, oleh karena itu profesi akuntansi diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam penyediaan dan pengembangan SDM akuntansi di sektor pemerintahan.”

Hal ini memberikan bukti bahwa pemahaman terhadap peraturan, penempatan sesuai latar belakang pendidikan, pemahaman uraian pekerjaan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sangat diperlukan agar penerapan SAP berbasis akrual dapat diwujudkan. Selain itu, meskipun penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual telah dipermudah dengan bantuan aplikasi, kesalahan masih mungkin terjadi jika proses input data dilakukan tidak benar, sehingga kemampuan sumber daya manusia tetap memiliki peran yang krusial dalam hal ini.

2.2.2 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Menurut Faradillah (2013) dalam Ni Made Ari Widyastuti (2015) :

“Kompleksitas dalam penerapan basis akrual membutuhkan sistem yang lebih terpadu dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Hal

ini tentu saja membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk dapat mewujudkannya.”

Menurut Athukorala (2003) dalam Widjajerso (2009) menyatakan :

“Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan basis akrual diantaranya adalah Sistem informasi akuntansi harus memadai. Karena informasi akuntansi merupakan titik penting dalam pergantian dari basis kas ke basis akrual”

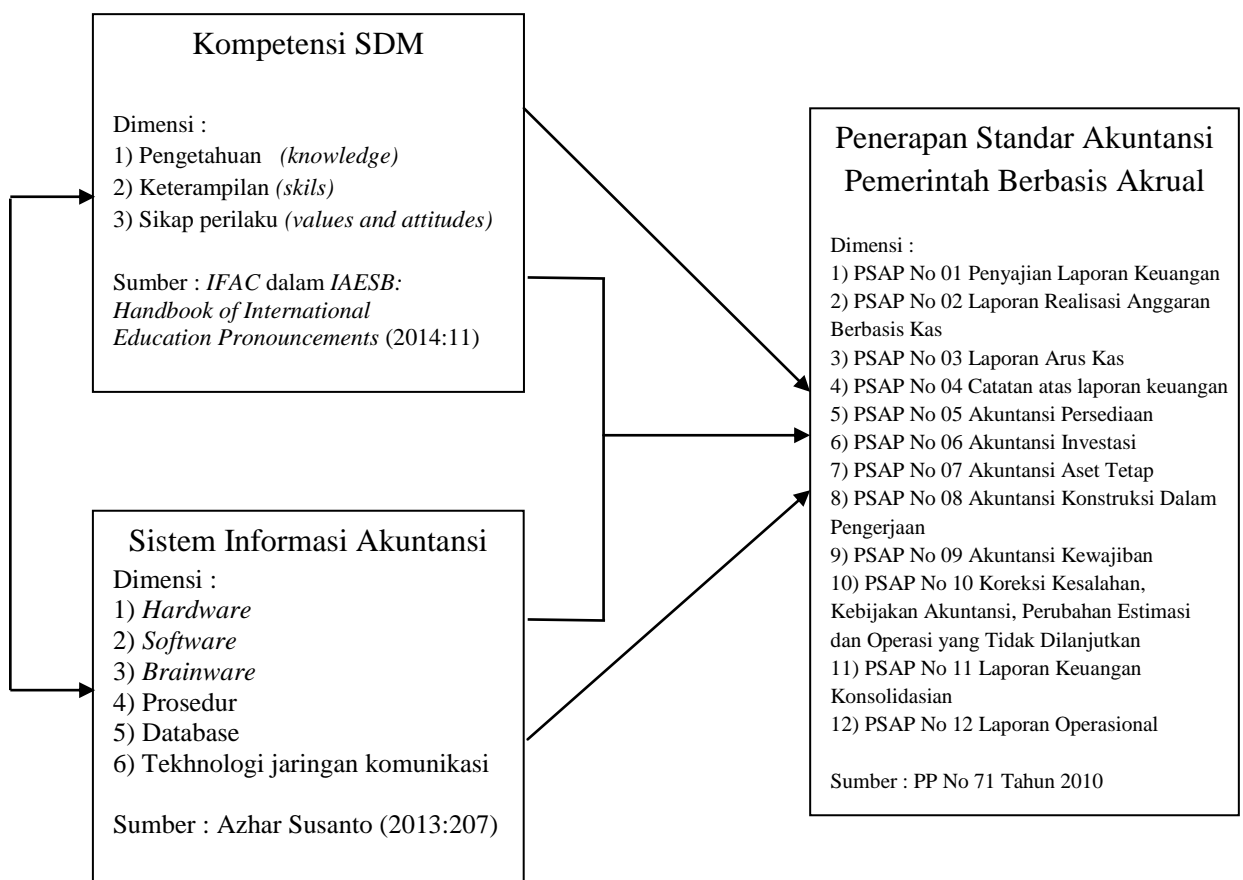
Dalam rangka mendukung penerapan basis akuntansi akrual, penggunaan teknologi yang andal amat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan data baik pada masa transisi maupun pada masa penerapan basis akrual secara penuh. Persiapan di bidang teknologi informasi terutama diarahkan untuk pengembangan sistem akuntansi.

Sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari sistem yang digunakan untuk membuat pelaporan keuangan. penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang berbasis akrual (SIMDA) dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi *multi user* dan teknologi *client/server*, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan keuangan baik dilaksanakan di SKPKD maupun di SKPD, sehingga mempunyai keuntungan yaitu pengendalian transaksi terjamin, efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya, serta cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan. Dengan adanya SIMDA dari pemerintah pusat maka pengelolaan laporan keuangan akan lebih mudah dilaksanakan. Hanya saja SDM yang menerapkan harus menguasai

keseluruhan sistem tersebut.

Dalam kerangka pemikiran di atas maka dapat di buat paradigma penelitian, dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:93) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- H1: Terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.
- H2: Terdapat pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.
- H3: Terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.